



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **DANI DWI WIDAGDO**
2. Jabatan : **PEJABAT PENGADAAN BARANG DAN JASA (PPBJ)**
3. NHK : **62812**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **1.275.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 124 m2/90 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , WARISAN Rp. 625.000.000
2. Tanah dan Bangunan Seluas 112 m2/95 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HASIL SENDIRI Rp. 650.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **309.750.000**

1. MOTOR, HONDA VARO TECHNO Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 8.400.000
2. MOTOR, YAMAHA XRIDE 125 Tahun 2018, HASIL SENDIRI Rp. 13.550.000
3. LAINNYA, SEPEDA MERK UNITED SEPEDA GUNUNG Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 1.800.000
4. MOBIL, MITSUBISHI XPANDER Tahun 2022, HASIL SENDIRI Rp. 260.000.000
5. MOTOR, HONDA VARIO 160 Tahun 2023, HASIL SENDIRI Rp. 26.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **82.250.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **60.291.189**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **160.250.000**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **1.887.541.189**

**III. HUTANG** Rp. **---**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **1.887.541.189**



1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Khusus - Awal Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **NURUL IMANI**  
2. Jabatan : **BENDAHARA**  
3. NHK : **920417**

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	8.500.000
1. MOTOR, YAMAHA 2SX Tahun 2017, HASIL SENDIRI	Rp.	8.500.000
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	69.676.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	167.305.583
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	8.621.968
<b>Sub Total</b>	Rp.	254.103.551
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	254.103.551

## Catatan:

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Periodik - 2023)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

1. Nama : **ULIS SIHHAH**
2. Jabatan : **PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN (PPK)**
3. NHK : **729040**

**II. DATA HARTA**

**A. TANAH DAN BANGUNAN** Rp. **375.000.000**

1. Tanah dan Bangunan Seluas 172 m2/84 m2 di KAB / KOTA KOTA SALATIGA , HIBAH DENGAN AKTA Rp. 375.000.000

**B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN** Rp. **73.500.000**

1. MOTOR, HONDA NC11BRID A/T Tahun 2013, HASIL SENDIRI Rp. 4.500.000
2. MOBIL, SUZUKI AERIO DX MT Tahun 2003, HASIL SENDIRI Rp. 45.000.000
3. MOTOR, HONDA GL 15B1DF M/T Tahun 2013, HADIAH Rp. 7.000.000
4. MOTOR, HONDA X1H0ZN35M1A/T / MATIC Tahun 2020, HASIL SENDIRI Rp. 17.000.000

**C. HARTA BERGERAK LAINNYA** Rp. **55.200.000**

**D. SURAT BERHARGA** Rp. **---**

**E. KAS DAN SETARA KAS** Rp. **51.046.939**

**F. HARTA LAINNYA** Rp. **---**

**Sub Total** Rp. **554.746.939**

**III. HUTANG** Rp. **1.000.000**

**IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)** Rp. **553.746.939**

Catatan:

1. Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara



Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

2. Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
3. Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.



**PENGUMUMAN**  
**LAPORAN HARTA KEKAYAAN PENYELENGGARA NEGARA**  
(Tanggal Penyampaian/Jenis Laporan - Tahun: 1 Januari 2024/Khusus - Akhir Menjabat)

**BIDANG** : EKSEKUTIF  
**LEMBAGA** : BADAN PUSAT STATISTIK (BPS)  
**UNIT KERJA** : BADAN PUSAT STATISTIK PROVINSI JAWA TENGAH

**I. DATA PRIBADI**

- Nama : DHANI SETYO RETNO FURI
- Jabatan : BENDAHARA
- NHK : 921216

**II. DATA HARTA**

<b>A. TANAH DAN BANGUNAN</b>	Rp.	----
<b>B. ALAT TRANSPORTASI DAN MESIN</b>	Rp.	20.000.000
1. MOTOR, YAMAHA MIO Tahun 2022, HASIL SENDIRI	Rp.	
14.000.000		
2. MOTOR, HONDA MEGA PRO Tahun 2007, HASIL SENDIRI	Rp.	
6.000.000		
<b>C. HARTA BERGERAK LAINNYA</b>	Rp.	23.000.000
<b>D. SURAT BERHARGA</b>	Rp.	----
<b>E. KAS DAN SETARA KAS</b>	Rp.	72.623.954
<b>F. HARTA LAINNYA</b>	Rp.	----
Sub Total	Rp.	115.623.954
<b>III. HUTANG</b>	Rp.	----
<b>IV. TOTAL HARTA KEKAYAAN (II-III)</b>	Rp.	115.623.954

**Catatan:**

- Rincian harta kekayaan dalam lembar ini merupakan dokumen yang dicetak secara otomatis dari [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id). Seluruh data dan informasi yang tercantum dalam dokumen ini sesuai dengan LHKPN yang diisi dan dikirimkan sendiri oleh Penyelenggara Negara melalui [elhkpn.kpk.go.id](http://elhkpn.kpk.go.id), serta tidak dapat dijadikan dasar oleh Penyelenggara Negara yang bersangkutan atau siapapun juga untuk menyatakan bahwa harta kekayaan yang bersangkutan tidak terkait tindak pidana. Apabila dikemudian hari terdapat harta kekayaan milik Penyelenggara Negara dan/atau Keluarganya yang tidak dilaporkan dalam LHKPN, maka Penyelenggara Negara wajib untuk bertanggung jawab sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- Pengumuman ini telah ditempatkan dalam media pengumuman resmi KPK dalam rangka memfasilitasi pemenuhan kewajiban Penyelenggara Negara untuk mengumumkan harta kekayaan sesuai dengan Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme.
- Pengumuman ini tidak memerlukan tanda tangan karena dicetak secara otomatis.